

**PERUBAHAN WAJAH ANCAMAN
DAN
KEAMANAN DOMESTIK INDONESIA**

Oleh:

Mayjen TNI Sudrajat, MPA

PERUBAHAN WAJAH ANCAMAN DAN KEAMANAN DOMESTIK INDONESIA ¹

Mayjen TNI Sudrajat, MPA ²

“Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman”

(Pasal 6 Bab III, UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara)

Pengantar

Secara teoritis hampir dipastikan bahwa gerak pembangunan khususnya dalam pembangunan hukum nasional selalu bersentuhan dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam konteks ekonomi, sosial, politik maupun keamanan. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkesinambungan, gerak pembangunan yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari adanya perubahan wajah ancaman (*the shifting of nature threat*) yang berlangsung di tengah-tengah hiruk pikuknya isu-isu globalisasi berikut implikasinya, serta kecenderungan negara-negara besar yang secara unilateral dalam memainkan agenda globalnya guna mengatasi keamanan internasional.

Dalam konteks yang lebih luas melemahnya rezim ekonomi global yang ditandai dengan kemunduran pertumbuhan ekonomi terasa sebagai sebuah beban yang sangat berat bagi negara-negara berkembang khususnya bagi Indonesia. Hal ini disebabkan selama hampir setengah abad lebih negara-negara berkembang sangat tergantung kepada negara-negara maju baik dari segi teknologi maupun ekonomi. Beberapa negara berkembang bahkan telah menjadi “*good boy*” bagi kepentingan ekonomi dan politik; negara-negara yang lebih kuat. Namun demikian, perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam struktur sosial dan ekonomi global secara makro nampaknya tidak berpengaruh pada hubungan-hubungan ketergantungan antara ekonomi-politik di negara-negara berkembang dengan negara-negara yang terlanjur menjadi patronnya.

Berkaitan dengan perkembangan keamanan domestik di Indonesia dewasa ini, sesungguhnya banyak diawali oleh adanya stagnasi pembangunan ekonomi yang seharusnya dapat berimplikasi terhadap taraf kehidupan sosial masyarakat. Munculnya konflik-konflik vertikal maupun horizontal di beberapa daerah tidak terlepas dari adanya metamorfosis faktor ekonomi yang rapuh kemudian bemuara pada masalah keamanan.

¹ Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya “Pembangunan Hukum Nasional VIII”, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003.

² Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi keamanan domestik yang belakangan ini cenderung labil dan sangat erat kaitannya dengan persoalan ekonomi masyarakat (*prosperity*) menyusul terjadinya krisis moneter dan ekonomi pada 1997 lalu.

Perubahan Wajah Ancaman

Dalam melihat perkembangan kondisi keamanan domestik, setidaknya patut dipahami bahwa kini masalah keamanan telah mengalami perubahan yang mendasar. Karena itu, sumber ancaman (*source of threat*) terhadap apa yang selama ini dikenal sebagai “keamanan nasional” pengertiannya menjadi semakin luas, bukan hanya meliputi ancaman dari dalam (*internal threat*) dan atau luar (*external threat*), tetapi juga ancaman *azymutal* yang bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman luar atau dalam. Seirama dengan itu, watak dan wajah ancaman juga berubah multi dimensional. Sebab-sebab konflik menjadi, semakin majemuk dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer. Dalam perkembangan kekinian di samping persoalan-persoalan keamanan tradisional yang dapat mengancam langsung maupun tidak langsung, muncul pula masalah-masalah keamanan baru yang lebih langsung mempengaruhi keamanan nasional, yakni isu ancaman keamanan baru non tradisional (*non traditional security issues*) yang meliputi isu-isu terorisme (*terrorism*), lalu lintas obat terlarang (*drug trafficking*), perompakan dan pembajakan bersenjata di laut (*piracy and arms robbery at sea*), pencucian uang (*money laundering*), kejahatan dunia maya (*cyber crime*), penyelundupan senjata (*small weapons/ arms smuggling*), penyelundupan orang (*people smuggling*), perdagangan wanita dan anak-anak (*women and children trafficking*) yang hampir kesemuanya merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang notabene ikut melengkapi masalah-masalah keamanan domestik di masa kini dan mendatang.

Kecenderungan Keamanan Domestik Saat Ini

Sebelum beranjak pada gambaran kecenderungan keamanan domestik, maka seyogyanya terminologi keamanan domestik tidak dipahami secara parsial. Pemahaman selama ini tentang ancaman keamanan yang muncul dari dalam negeri (*domestic threat*) yang lazim disebut dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sesungguhnya hanyalah sebagian dari masalah keamanan domestik. Karena itu berbicara masalah keamanan domestik saat ini, maka mempunyai banyak variabel yang perlu dikaji secara komprehensif termasuk di dalamnya menyangkut masalah gangguan keamanan yang bersifat asimetris, baik dalam konteks keamanan ekonomi, sosial, politik maupun yang bersifat ancaman militer lainnya. Meskipun bentuk ancaman keamanan itu cenderung datangnya dari dalam negeri tidaklah berarti tidak terkait dengan dimensi keamanan regional maupun internasional. Misalnya saja ketika konflik sosial di Ambon ataupun gerakan Separatis Bersenjata di Aceh meluas tidak terlepas dengan adanya lalu lintas senjata ringan (*small arms trafficking*). Begitu pula dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar sebagai akibat maraknya pencucian uang menunjukkan bahwa ancaman tersebut juga diwarnai oleh faktor-faktor eksternal.

Dalam menggambarkan kecenderungan masalah keamanan domestik di Indonesia, setidaknya dapat dilihat perkembangannya yang signifikan sejak kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini diawali ketika reformasi digulirkan pada 1998 menyusul krisis ekonomi. Selain itu, mencuatnya isu terorisme internasional sejak peristiwa 11 September juga memberi pengaruh terhadap munculnya reaksi gerakan-gerakan radikal ataupun kelompok garis keras (*hard liner*) dari dalam negeri sebagai bentuk respon terhadap adanya stigma Barat versus Islam. Kondisi ini tentunya telah membawa dilema tersendiri dalam melaksanakan "*law and order*" secara konsisten mengingat kerap kali menjadi komoditas politik oleh sebagian kelompok tertentu.

Karena itu, secara umum keamanan domestik saat ini banyak diwarnai dengan konflik sosial dan politik baik secara horizontal maupun vertikal yang diawali oleh adanya faktor ekonomi, sehingga masalah gangguan keamanan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia nampaknya lebih berakar pada sejumlah faktor struktural yang berdimensi ekonomi disamping dimensi sosial politik dan keamanan lainnya.

Dimensi Ekonomi

Gangguan keamanan ekonomi di tanah air telah menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks dalam dinamika pembangunan nasional. Meskipun kini Indonesia telah mengalami pemulihan ekonomi secara bertahap, namun di sana sini Indonesia telah mengalami pemulihan ekonomi secara bertahap namun di sana sini masih terdapat berbagai gangguan ekonomi baik ditinjau secara makro maupun mikro.

Secara makro, perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa akselerasi pembangunan ekonomi nasional yang semestinya dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil dan merata mengalami kendala mendasar. Kondisi ini dapat terlihat bahwa ada kecenderungan beberapa daerah yang masih memiliki potensi sumber daya menghendaki untuk memekarkan diri sebagai sebuah propinsi yang otonom, bahkan beberapa daerah berupaya untuk memisahkan diri. Pertimbangan beberapa daerah tersebut umumnya mempunyai alasan misalnya, distribusi *welfare state* yang tidak adil memicu kesenjangan ekonomi antar daerah.

Adanya tuntutan atau "*demanding*" masyarakat lokal terkait dengan otonomi daerah pada saat reformasi digulirkan sesungguhnya diharapkan dapat membawa solusi bagi pembangunan ekonomi nasional. Namun karena pengelolaannya yang tidak mempertimbangan kepentingan nasional secara utuh, maka yang terjadi adalah justru sebaliknya dimana kemudian berdampak pada masalah manajemen pembangunan dan keamanan ekonomi, yang kemudian berujung kepada masalah perebutan sumber daya. Karena itu, secara makro ekonomi Indonesia dilihat dari perspektif ketahanan ekonomi tidak menunjukkan sinergisitas dalam mendorong roda perekonomian nasional.

Sementara itu, secara mikro ekonomi, nampak telah terjadi kesenjangan di tengah masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*). Di lain pihak beberapa kelompok masyarakat dapat menikmati kebutuhan yang lebih bersifat sekunder dan tertier, sehingga mendorong terjadinya disparitas ekonomi.

Begitu halnya adanya investasi asing di daerah-daerah yang semestinya dapat mendukung ekonomi masyarakat setempat justru memicu "*social gap*", yang kemudian berujung pada isu-isu politik seperti di Papua, Aceh, Riau. Karena itu yang paling penting dalam mengatasi masalah keamanan ekonomi saat ini paling tidak kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara baik sehingga tidak berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Sebagai ilustrasi beberapa waktu lalu yang terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan BBM, telepon dan tarif dasar listrik termasuk kenaikan beberapa bahan pokok telah menjadi sumber pemicu munculnya gejolak sosial yang mengarah pada tindakan anarkis sejumlah kelompok masyarakat yang kemudian mengganggu kamtibmas.

Meskipun kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah selama ini disadari bahwa untuk meningkatkan kondisi perekonomian nasional secara makro, namun karena persoalan-persoalan keamanan moneter dan perbankan, investasi, serta terganggunya perdagangan internasional sebagai akibat mengemukanya isu-isu terorisme, pembajakan, pencucian uang maupun yang terkait dengan masalah ekonomi politik internasional yang tidak menentu, maka resiko ekonomi mikro harus ditanggung oleh masyarakat.

Dimensi Sosial

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia pada dasarnya bersifat moderat dan akomodatif, hal ini terlihat bahwa sebagian besar masyarakat masih bersifat terbuka untuk saling menghargai suku, agama, maupun golongan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia meskipun bersifat pluralistik akan tetap mempunyai potensi dalam melaksanakan pola-pola hubungan sosial antar kelompok.

Terganggunya pola hubungan sosial masyarakat sebenarnya tidak terlepas dengan adanya euforia demokrasi yang berlebihan yang kemudian justru merusak semangat reformasi. Adanya tindakan yang amat impulsif dan dangkal oleh masyarakat tersebut mempunyai implikasi terhadap kebebasan yang tidak terkontrol sehingga mengancam kondusifitas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di samping itu, kondisi masyarakat Indonesia yang rentan terhadap tindakan provokasi memudahkan konflik komunal berkembang cepat dan luas, serta memungkinkan gangguan terhadap ketertiban publik yang secara eskalatif dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Struktur masyarakat yang heterogen, tingkat pendidikan yang belum maju, serta krisis ekonomi yang belum pulih, menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu stabilitas nasional.

Oleh karena itu, secara faktual bila dilihat dari komposisi masyarakat Indonesia yang heterogen tersebut, yang juga disertai karakteristik geografis berupa negara kepulauan, sungguh sangat disadari bahwa potensi ancaman integritas bangsa tidak dapat dipisahkan oleh meluasnya friksi-friksi komunal selama ini. Sebagai ilustrasi bahwa konflik komunal selama ini dipicu oleh eksklusivisme suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), serta kesenjangan sosio-ekonomi. Selain itu, perpindahan penduduk secara massal dari satu wilayah ke wilayah lain selain berpengaruh terhadap tata

kehidupan dan budaya setempat, juga berpotensi sebagai sumber konflik (*clash of civilization*). Konflik yang terjadi di Maluku, Sulawesi Tengah (Poso), Kalimantan (Sanggau Ledo, Sampit, Sambas), adalah contoh konkret konflik komunal yang bersumber etno-religius. Kerugian yang diakibatkan oleh konflik komunal yakni timbulnya gelombang pengungsian, penderitaan luar biasa bagi masyarakat, korban jiwa, serta kerugian harta benda yang cukup besar.

Resiko terbesar yang ditimbulkan oleh konflik komunal adalah rusaknya solidaritas berbangsa maupun rusaknya ikatan persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu, kerusakan berbagai infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam skala besar menyebabkan terganggunya kegiatan pemerintahan, terhambatnya kegiatan pelayanan masyarakat, serta terbengkalainya penyelenggaraan pendidikan.

Dimensi Politik

Keamanan domestik secara khusus banyak diwarnai oleh adanya *turbulens* politik nasional saat ini. Banyaknya kepentingan-kepentingan kelompok sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru hingga memasuki era reformasi, permasalahan banyak timbul karena dipicu oleh adanya pertarungan "perebutan kekuasaan". Menjamurnya partai-partai mengindikasikan semakin rentannya pertikaian antar kelompok masyarakat. Mengemukanya demokrasi selama reformasi digulirkan sesungguhnya banyak menyita perhatian bagi kelompok-kelompok tertentu (partai politik, LSM, mahasiswa) untuk memanfaatkan momentum tersebut sehingga tidak jarang dari mereka dalam aksi politiknya mengarah pada masalah tindakan anarkisme, radikalisme yang pada akhirnya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, pertentangan politik yang menonjol dan kerap kali mempengaruhi stabilitas nasional adalah tentang potret konflik elit politik saat ini. Pertentangan eksekutif dan legislatif selama ini cukup menggambarkan keprihatinan bagi perkembangan politik nasional yang semestinya dapat mendidik masyarakat dalam berpolitik.

Adanya friksi dalam institusi-institusi tersebut tidak jarang berakhir pada sebuah polemik yang berkepanjangan sehingga memperparah keamanan domestik. Potret lain yang menjadi indikasi kompleksnya masalah-masalah politik nasional adalah munculnya sejumlah manuver-manuver politik menjelang Pemilu 2004. Salah satu bentuk potensi ancaman keamanan domestik ke depan adalah saratnya aktifitas-aktifitas praktek anti demokrasi, pemaksaan, tindakan kekerasan oleh kelompok tertentu yang dapat menghadapkan bangsa Indonesia menuju pada sebuah situasi yang tidak menentu.

Dimensi Pertahanan Keamanan

Isu keamanan yang timbul di dalam negara yang paling menonjol adalah Gerakan separatis bersenjata, terorisme, konflik komunal berciri etno-religious, kelompok radikal, kerusuhan sosial, dan perkelahian pelajar. Dalam konteks isu separatisme, yang kini menjadi fokus perhatian adalah Gerakan Separatis Bersenjata Aceh (GSBA) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Aksi-aksi yang dikembangkan oleh kelompok separatis dalam bentuk tindakan kejahatan dan kekerasan telah menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat setempat dan berdampak luas pada keamanan nasional secara luas. Kejahatan dan kekerasan yang dilakukan kelompok separatis tersebut, tidak saja menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa, juga mengakibatkan terjadinya pengungsian penduduk, serta mengganggu fungsi-fungsi pemerintahan. Penyelesaian isu separatis menjadi semakin kompleks karena kelompok separatis berlindung di balik isu HAM, mencari dukungan dan mengalihkan basis gerakan di luar negeri.

Kecenderungan keamanan yang juga saat ini menjadi fokus perhatian penting adalah masalah isu terorisme. Isu ini pada dasarnya merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan bangsa, bahkan menjadi ancaman bagi demokrasi dan *civil society*. Sejak tahun 1999 hingga peristiwa pemboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002, kegiatan teror di Indonesia meningkat cukup tajam terutama dalam bobotnya, sehingga mengganggu proses pembangunan ekonomi.

Selain masalah ancaman terorisme, muncul pula radikalisme dalam bentuk lain, misalnya dengan menggunakan atribut agama. Konflik di Maluku dan Poso, menunjukkan adanya peran kelompok-kelompok tersebut. Paham keagamaan telah diimplementasikan secara sesat dan menyimpang, untuk mempengaruhi dan meyakinkan para pengikutnya, bahwa perjuangannya adalah perjuangan suci, sehingga mereka tidak segan-segan menggunakan cara apa saja untuk mencapai tujuannya. Kelompok-kelompok itulah yang disebut sebagai kelompok radikal oleh garis keras yang keberadaan serta cara-cara perjuangannya sangat mengganggu ketertiban publik dan pada muaranya mengganggu keamanan domestik.

Isu-isu keamanan baru domestik yang lain saat ini adalah menyangkut kejahatan trans-national. Isu keamanan trans-national yang dihadapi Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni gangguan keamanan di laut, gangguan keamanan di udara, dan gangguan keamanan melalui wilayah perbatasan. Sedangkan isu-isu menonjol adalah pembajakan dan perompakan di laut, imigran gelap penangkapan ikan secara ilegal, dan penyelundupan (*people smuggling, small army smuggling*), beredaran obat-obatan terlarang.

1. Gangguan Keamanan Laut

Kegiatan perdagangan dan transportasi internasional baik melalui wilayah perairan perbatasan dengan negara lain maupun melalui *Sea Lines of Communication* (SLOC) dan *Sea Lines of Transportation* (SLOT) di perairan Indonesia terus meningkat. Aktivitas perairan yang meningkat tersebut menempatkan laut memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia maupun bagi masyarakat internasional. Arti penting laut yang dimaksud, bukan hanya terbatas pada kekayaan sumber daya alam belaka, tetapi juga sebagai penghubung pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelago state*) telah menempatkan keamanan laut sangat vital bagi Indonesia termasuk dunia internasional. Hal ini terbukti bahwa laut Indonesia yang

dibagi menjadi 3 ALKI telah mendapat perhatian serius bagi AS dan Australia. Akhir-akhir ini, isu keamanan laut cukup perlu perhatian, serius. Isu keamanan laut tersebut meliputi ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan dan sabotase serta teror obyek vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya (perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya), dan ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara ilegal, imigran, gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara ilegal, termasuk pengambilan harta karun, penyelundupan barang dan senjata, serta penyelundupan kayu gelondongan melalui laut. Isu keamanan laut memiliki dimensi gangguan terhadap hubungan internasional Indonesia.

Data menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami kerugian sebesar US\$ 2.136 juta atau sekitar Rp 19,2 triliun akibat pencurian ikan.³ Sedangkan berdasarkan laporan FAO pada tahun 2001 jumlah ikan yang ditangkap secara ilegal di Indonesia mencapai 1 juta ton per tahun dengan nilai kerugian US\$ 1 juta (Rp 9 miliar) sampai US\$ 4 milyar (38 triliun). Sementara itu, berdasarkan data mutakhir yang diolah dari berbagai sumber tentang sekilas kekayaan negara yang diselundupkan di dan atau lewat laut adalah: pasir laut senilai US\$ 8 milyar (72 triliun), BBM senilai US\$ 5,6 milyar (Rp 50 triliun), kayu senilai US\$ 3-4 milyar (Rp 30 triliun).

2. Gangguan Keamanan Udara

Potensi strategis Indonesia sebagai salah satu poros lalu lintas dunia internasional menempatkan Indonesia rawan terhadap berbagai ancaman keamanan udara. Isu keamanan udara dengan potensi ancaman di masa mendatang meliputi ancaman kekerasan (pembajakan udara, sabotase obyek vital, teror), ancaman pelanggaran udara (penerbangan gelap dan pengintaian terhadap wilayah Indonesia), ancaman sumber daya (pemanfaatan wilayah udara oleh negara lain), dan ancaman pelanggaran hukum melalui media udara (migrasi ilegal dan penyelundupan manusia). Untuk mengawasi dan mengamankan wilayah udara dari segala gangguan dan ancaman, Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai kelemahan antara lain SDM, sarana serta prasarana yang diperlukan.

Seperti halnya wilayah laut, kepentingan keamanan wilayah udara hukum hanya menjadi kepentingan Indonesia, tetapi juga dalam rangka mengamankan kepentingan kawasan dan dunia internasional. Karena itu, bila Indonesia tidak mampu mengatasi masalah keamanan di wilayah tersebut bukan mustahil aksi manuver pesawat *F-18 Hornet* Amerika Serikat yang lalu dapat menjelma menjadi *legal intervention*.

3. Gangguan Keamanan Melalui Wilayah Perbatasan

Secara geografis Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yakni dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Palau, India, Timor Leste, dan Australia. Dari 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia, terdapat tiga negara yang berbatasan darat dengan Indonesia, yakni dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Isu-

³ Sumber data diperoleh dari Departemen Kelautan dan Perikanan

isu keamanan di perbatasan laut pada hakekatnya sudah dibahas di atas. Pada wilayah-wilayah perbatasan darat, isu-isu keamanan yang menonjol meliputi pencurian sumber daya alam, di antaranya hasil-hasil hutan, penyelundupan barang, senjata dan bahan peledak, obat-obatan terlarang, serta penyelundupan manusia.

Panjangnya garis perbatasan dengan medan yang sulit membuat jalur-jalur perbatasan darat belum dapat diawasi seluruhnya. Isu lain yang menonjol dari wilayah perbatasan darat adalah menyangkut tataran kewenangan. Dari tiga wilayah perbatasan darat tersebut terdapat tiga Departemen yang bertindak sebagai *leading sector*, yakni untuk perbatasan di Kalimantan yang menjadi *leading sector* adalah Dephan; perbatasan di papua, *leading sector* adalah Depdagri; sedangkan perbatasan Timor Leste, *leading sector* adalah Deplu. Pertanyaannya, mengapa sampai begini? Perlu pembenahan ke depan !!

Pentingnya Pembangunan Hukum Nasional

Dari uraian tentang kondisi keamanan domestik dihadapkan dengan pembangunan hukum nasional, terdapat keterkaitan yang erat. Salah satu substansi semangat reformasi adalah menegakkan supremasi hukum. Semangat reformasi untuk menegakkan hukum tersebut jangan sampai hanya suatu retorika belaka. Sepanjang perjalanan pemerintahan reformasi secara jujur kita harus berkata bahwa hukum belum superior. Bahkan sebaliknya politik seringkali superior dari hukum. Berbagai permasalahan yang menjadi lingkup hukum justru diselesaikan melalui *political bargaining*. Sampai kapankah kondisi seperti ini terus berlangsung, ataukah harus kita akhiri dengan menempatkan hukum sebagai yang superior.

Kondisi keamanan domestik seperti digambarkan di atas memerlukan penyelesaian hukum. Kalau saja masyarakat Indonesia sudah taat hukum, kita berkeyakinan bahwa kondisi keamanan Indonesia akan segera membaik, dimana sejumlah isu keamanan domestik dapat ditekan sampai pada titik terendah.

Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama ditinjau dari aspek hukum. Misalnya perlunya instrumen hukum untuk melindungi kekayaan alam baik di laut maupun di daratan seiring dengan adanya perubahan wajah ancaman saat ini dan ke depan. Demikian pula halnya dengan instrumen hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kapasitasnya sebagai insan-insan hukum. Ini yang perlu dibangun. Membangun instrumen hukum tidak hanya terbatas pada perangkat perundang-undangan dari sisi *software*, tetapi juga *hardware* yang bersih dan berwibawa, yang memiliki jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara menuju *good governance*.

Denpasar, Juli 2003.